

## Gerindra: Prabowo -Megawati Tak Lama Lagi Bisa Bertemu

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhan menegaskan, pertemuan antara Ketua Umum Gerindra sekaligus capres pemenang Pemilu 2024 Prabowo Subianto, dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, sangat masuk akal terjadi. Habiburokhan meyakini kedua tokoh tersebut akan bertemu dalam waktu dekat.

"Feeling saya masuk akal kalau kedua beliau bisa bertemu dalam waktu yang tidak terlalu lama, beliau berdua sahabat," ujar Habiburokhan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/4).

Ia mengungkapkan bahwa Prabowo selalu melarang kader Gerindra menyerang Megawati. Dia menyebut Prabowo memerintahkan kader Gerindra untuk menghormati sosok Presiden ke-5 tersebut.

"Pak Prabowo selalu mewanti-wanti ke kami di acara-acara internal, acara dewan pembina, kalian tidak boleh menyerang sosok Ibu Mega. Kalau kita beradu argumentasi soal pemilu boleh, tapi kalau Ibu Mega ya kan kita jaga beliau i, kita hormati beliau sebagai tokoh nasional, tokoh bangsa dan anak proklamator," tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris

Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Prabowo dan Megawati bisa jadi bertemu dalam waktu dekat.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga menegaskan pihaknya terbuka terhadap wacana pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Airlangga mengaitkan wacana pertemuan tersebut dengan periode kritis di Indonesia selama 10 tahun ke depan.

"Partai Golkar adalah partai terbuka. Dan yang paling penting 10 tahun ke depan bagi Golkar dalam periode yang dalam tanda petik critical bahwa dalam bonus demografi ini harus netes prasyaratnya harus stabil sehingga program bisa didorong. Dan juga tentu kita harus tumbuh di atas 6 persen," ujar Airlangga.

Airlangga menjelaskan, periode kritis ini membuat pihaknya terbuka terhadap siapa pun yang ingin Indonesia maju. Lalu, Airlangga menegaskan Prabowo memiliki hubungan yang baik dengan seluruh partai, termasuk lawan politik. "Ke depan seperti disampaikan dalam kampanye bahwa beliau akan menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia, baik yang memilih atau yang tidak memilih," ujar Airlangga Hartarto. ● han

# 2 | Polhukum

IDN/ANTARA



## SIDANG LANJUTAN SENGKETA HASIL PILPRES 2024

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (1/4). Dalam sidang tersebut MK memeriksa 11 saksi dan tujuh ahli yang dihadirkan dari pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

## Tim Hukum AMIN Hadirkan 7 Ahli dan 11 Saksi di Sidang PHPU Presiden

Tim hukum Amin menyebut kubu Prabowo-Gibran seyogianya mendukung kehadiran menteri-menteri dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.

JAKARTA (IM) - Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi dalam

pada pukul 08.00 WIB, di Gedung MK. Sidang sendiri dipimpin langsung oleh Ketua MK, Suhartoyo.

"Sidang dengan agenda pemeriksaan persidangan untuk mendengar keterangan saksi dan ahli dari Pemohon I. Berdasarkan catatan yang disampaikan kepaniteraan pemohon I mengajikan tujuh ahli dan 11 saksi," kata Suhar-

toyo di persidangan PHPU.

Sebelum persidangan dimulai, para saksi dan ahli disumpah sesuai dengan agama yang dianut, sampai akhirnya seorang ahli yang dihadirkan Tim hukum Nasional AMIN, bernama Bambang Eka Cahya memulai pemaparan dalam persidangan tersebut.

Sebelumnya, Dalam persidangan lanjutan sengketa pilpres itu, MK akan memeriksa sejumlah saksi yang akan dihadirkan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

"Agenda Sidang, Pemeriksaan Perkara dan Acara Sidang, Pembuktian Pemohon (Mendengarkan keterangan ahli dan saksi Pemohon dan Pengesahan alat bukti tambahan Pemohon)," tulis keterangan di laman resmi MK, dilihat MNC Portal Indonesia, pukul 06.30 WIB.

Diketahui, MK menjamin tidak akan membocorkan nama saksi maupun ahli yang diajukan oleh pemohon kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Nama saksi akan dirahasiakan sepanjang bukan kubunya sendiri yang mengungkap.

Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dalam agenda sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Permintaan kubu AMIN untuk menutupi siapa saksi yang akan dihadirkan itu beralasan agar saksi yang ditunjuk terhindari dari intimidasi.

"Iya itu pertimbangan. Inshaallah tidak bocor, kecuali anda sendiri yang bocorkan," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, Rabu

(27/3) lalu.

### Soal Kehadiran Menteri

Tim hukum pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) menganggap, kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming seyogianya mendukung menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju hadir ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Usulan ini sebelumnya dimintakan oleh kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD kepada majelis hakim. Usulan pemanggilan itu terkait dugaan pengurangan sumber daya negara oleh Istana untuk mendongkrak suara Prabowo-Gibran.

"Kalau dia (Prabowo-Gibran) tidak mendukung (menteri dihadirkan), kesalahan fatal di dia," kata kuasa hukum Timnas Amin Bambang Widjojanto kepada wartawan di MK, Senin (1/4).

Bambang menilai, para menteri yang dianggap terlibat itu bukan hanya dapat memberikan kesaksian de audio (hasil mendengar), tetapi secara faktual juga melakukan hal-hal yang dianggap sebagai bagian dari upaya negara membantu pemenangan Prabowo-Gibran.

"Maka dia perlu membela diri, maka membela dirinya itu di sini. Kalau dia tidak hadir dia rugi besar, makanya kemudian (harus) hadir," ujarnya.

"Kami sebenarnya ingin mengusulkan juga pak Jokowi diundang, dipanggil karena kan penting sekali. Kalau kami memungkinkan untuk meminta kepada MK untuk memanggil," sebut Bambang sambil tertawa kecil. ● han



## SIDANG PERDANA MANTAN KEPALA BASARNAS DI PENGADILAN MILITER

Terdakwa kasus dugaan korupsi mantan kepala Basarnas Marsdy TNI (Purn) Henri Alfandi (kanan) bersiap memasuki ruang sidang di Pengadilan Militer Tinggi II-08, Cakung, Jakarta Timur, Senin (1/4). Sidang perdana tersebut digelar atas dugaan kasus korupsi dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas RI Tahun anggaran 2021-2023.

## PDI-P Siap-siap Gugat ke PTUN Atas Penyimpangan Pilpres 2024

JAKARTA (IM) - Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengatakan, partainya tengah menyiapkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menyelidiki dugaan penyimpangan yang terjadi di dalam proses Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Namun, PDI-P masih mengkaji sejumlah bukti-bukti yang dimiliki sebelum mengajukan gugatan itu ke PTUN.

"Iya untuk PTUN itu bukan dalam rangka untuk membatalkan hasil pemilu, begitu, tidak," kata Djarot di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara Nomor 19, Jakarta, Senin (1/4).

Salah satu bukti yang disorot PDI-P adalah soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2022 tentang syarat usia capres-cawapres. Selain itu, PDI-P juga menyoroti soal pimpinan KPU yang terbukti melanggar etik atas pencalonan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Jadi ke PTUN dalam rangka itu, untuk mencari keadilan dan supaya pelaksanaan pemilu, kelemahan-kelemahan yang kemarin terjadi yang kita rasakan," ujarnya.

Anggota DPR Fraksi PDI-P ini berharap, penyim-

pangan-penyimpangan pada Pilpres tidak lagi terjadi pada perhelatan demokrasi yang terdapat selanjutnya, yaitu Pilkada 2024.

Menurut Djarot, gugatan yang diajukan partainya ke PTUN juga sebagai bagian koreksi terhadap penyelenggaraan Pemilu.

"Jadi itu konteksnya, oleh karenanya ini lagi dibahas, lagi digodok tentang materi gugatan kita di PTUN," ujarnya.

Lebih jauh, dia menegaskan bahwa gugatan yang bakal diajukan ini murni inisiatif partainya. Dalam arti, gugatan itu tidak terkait partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 3 lainnya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo dan Partai Hanura.

"Kalau partai lain ya silakan saja. Ini otonomi kita, kan gitu ya. Kita sudah bahas di dalam dan perlunya kita untuk bisa menggugat secara PTUN. Kalau partai lain kita serahkan pada partai yang bersangkutan," tutur Djarot.

Sebagai informasi, kubu pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, saat ini sedang berproses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam upaya menggugat dugaan kecurangan Pilpres 2024. ● han

## MK Panggil Sri Mulyani, Risma, Airlangga, dan Muhadjir di Sidang Sengketa Pilpres

JAKARTA (IM) - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk memanggil 4 orang menteri Kabinet Indonesia Maju untuk berbicara di dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024, Jumat (5/4).

Keempat menteri itu meliputi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

"Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat Yang Mulia Para Hakim tadi pagi," kata Ketua MK Suhartoyo, Senin (1/4).

Satu pihak lain yang akan dipanggil MK pada hari itu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Suhartoyo menegaskan, pemanggilan ini bukan berarti MK mengakomodir permintaan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD selaku pemohon, yang memang sebelumnya meminta agar sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dipanggil Mahkamah.

Ia berujar, dalam sidang sengketa seperti ini, MK tidak bersifat berpihak dengan

mengakomodir keinginan salah satu pihak terlibat sengketa.

"Jadi semata-mata untuk mengakomodir kepentingan para hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon sebenarnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim, pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat (5/4)," jelas Suhartoyo.

Sebelumnya, MK membuka kans menghadirkan beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju ke dalam sidang sengketa Pilpres 2024, sebagaimana permintaan pemohon: Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Ketua MK Suhartoyo menegaskan, dalam perkara sengketa bersifat adversarial seperti ini, Mahkamah harus berhati-hati karena ada irisan-irisan keberpihakan jika majelis hakim memanggil orang tertentu selaku saksi/ahli pemohon. Sehingga, jikapun dihadirkan, maka menteri-menteri yang dipanggil itu bukan sebagai saksi/ahli pemohon, tetapi pemanggilan tersebut atas dasar kebutuhan Mahkamah.

"Mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh Mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan. Sangat bergantung pada pembahasan kami di rapat permusyawaratan hakim," kata dia dalam sidang

lanjutan, Kamis (28/3/2024).

"Sehingga nanti kalau dihadirkan juga, Mahkamah yang memerlukan, sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan," ujar Suhartoyo.

Kubu Anies meminta agar menteri yang dipanggil meliputi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ke ruang sidang.

Sementara itu, kubu Ganjar meminta menteri yang dipanggil meliputi Sri Mulyani dan Risma serta belakangan juga berencana meminta MK menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Permintaan kubu Anies dan Ganjar kemudian disanggah kubu capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming selaku pihak terkait. Kuasa hukum mereka, Otto Hasibuan, meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan lebih jauh. Otto berujar, seharusnya dalam perkara sengketa seperti ini, beban pembuktian ada pada pemohon sebagai pihak yang mendalilkan terjadinya pengurangan sumber daya negara oleh Istana. "Mungkin sebaiknya itu tidak diperlukan. Perlu juga dipertimbangkan relevansi kehadiran para menteri tersebut untuk perkara ini," sebut Otto. ● han

## KPK Periksa Eks Pejabat Kementan Terkait TPPU Mantan Mentan SYL

JAKARTA (IM) - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kabiro Umum dan Pengadangan Sekjen Kementerian Pertanian RI periode 2019-2020, Maman Suherman, sebagai saksi dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka Eks Mentan RI, Syahrul Yasin Limpo (SYL), Senin (1/4).

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri menjelaskan bahwa KPK menetakan SYL sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait promosi jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

SYL ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya, yakni, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyo (KS) serta Direktur Alat Mesin Pertanian Muhammad Hatta (MH).

"Kemudian, berproses sehingga diperoleh kecukupan alat bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan

tersangka sebagai berikut, SYL Menteri Pertanian periode 2019-2024, KS Sekjen Kementan, MH Direktur Alat dan Mesin Pertanian," kata Wakil Ketua KPK Johannis Tanak, saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (11/100) lalu.

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Ketiganya diduga juga ikut serta dalam proyek pengadaan barang dan jasa disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementan. Ketiganya diduga telah menerima sejumlah keuntungan atas perbuatan korupsinya.

KPK baru melakukan upaya penahanan terhadap Kasdi Subagyo. Kasdi ditahan usai diperiksa sebagai tersangka, Senin (1/4). ● mei

**PENGUMUMAN**  
Berdasarkan KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UNTUK PEMEGANG SAHAM PT. PILAR AESTICA SINERGI, berkedudukan di Kota Malang, telah diambil keputusan untuk menurunkan Modal setor dari Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) menjadi modal setor berjumlah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah), merujuk kepada Pasal 44 (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka bagi para yang berkepentingan/para Kreditor dan mempunyai keberatan atas hal tersebut, harap mengajukan keberatan secara tertulis dengan bukti pendukung yang sah paling lambat 60 hari terhitung dari tanggal pengumuman ini ke alamat:  
Perumahan Digtantara Permai  
Jl. Digtantara 1 No. C2-12 Kota Malang  
Kota Malang, 01 April 2024  
Direksi  
PT. PILAR AESTICA SINERGI

**PENGUMUMAN**  
PT MITRA BAHANA PASIFIK INDONESIA berkedudukan di Menara Palma, Lantai 22, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 6, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, Indonesia ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah diambilalih oleh pemegang saham baru.  
Pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 133 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  
Jakarta, 2 April 2024  
Perseroan  
Direksi



**SIDANG PUTUSAN ANDHI PRAMONO**  
Terdakwa kasus suap dan gratifikasi Andhi Pramono berjalan usai menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (1/4). Majelis hakim memvonis mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono dengan hukuman pidana 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsidi enam bulan kurungan setelah terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi senilai Rp58,9 miliar yang terdiri dari mata uang rupiah dan mata uang asing.